

**ABSTRACT**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian untuk mengatur urusan pemerintahan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. *Corporate social responsibility* merupakan salah satu materi yang diatur dalam peraturan daerah di berbagai daerah di Indonesia. dalam membuat peraturan daerah, pemerintah harus memperhatikan syarat - syarat yaitu wewenang, substansi, dan prosedur. Apabila syarat - syarat tersebut yang dimaksud tidak dipenuhi maka berakibat peraturan daerah yang dibuat tidak sah. Ketika peraturan daerah yang dibentuk tidak sah maka dapat diajukan pembatalan kepada Mahkamah Agung (*judicial review*). Sehingga ketika terjadi pembatalan peraturan daerah maka berakibat bahwa peraturan daerah tersebut tidak mengikat lagi.

Kata kunci : pemerintah daerah, peraturan daerah, *Corporate social responsibility*.

## **ABSTRAK**

Local governments have their own authority and independency to put in order local government issues. Each of them in order to function as government has the rights to make policies to improve both the community services and community involvements toward regional development. One of the vital part to implement this function is establishment of regional regulations. Corporate social responsibility is one of the materials that are governed by regional regulations of the local governments through out Indonesia. While establishing regional regulations the local governments have to heed on few criteria: authority, substance, and procedure. If any of these criteria is unmet, then the regulation established this way will be considered invalid. When a regional regulation is considered invalid, it is possible to propose for annulment to the Supreme Court (judicial review). With the annulment in effect, the regulations related will be considered void.

Keywords: regional regulation, local government, corporate social responsibility